



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
Jln Pusat Pemerintahan No.1 Tlp. (0553) 21408, Fax (0553) 21292
M A L I N A U 77154



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung Manajemen Kinerja yang Akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan strategis dan memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab, bersih, transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja merupakan instrumen untuk mengontrol suatu kegiatan terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungannya diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta strategi yang digunakan untuk mencapainya.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan harus sesuai dengan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai Input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan terhadap pembangunan dan pelayanan prima kepada Masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi



yang objektif bagi Penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stakeholders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretaris Daerah.

Malinau,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Malinau

Dr. ERNES SILVANUS, S.Pi, MM

NIP. 19740914 199803 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 merupakan bentuk Pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja Sekretariat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan. LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 terhadap berhasil dicapai.

Untuk mengoptimalkan pencapaian Tujuan dan Sasaran serta mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Sekretariat Daerah perlu melakukan langkah langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kinerja pemerintah agar Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dapat terlaksana sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Koordinasi yang lebih baik dengan PD yang lain maupun ketingkat Provinsi;

Prasyarat keberhasilan implementasi Kebijakan, Program dan Kegiatan masa depan adalah meningkatkan Kinerja Aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau serta terbangunnya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja “Tuntas” berdasarkan norma hukum Etika Birokrasi Pemerintah dan berbasiskan manajemen



kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hal Ini akan meningkatkan dan memperkuat modal kepercayaan (*Trust*) masyarakat pada Pemerintah.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii

BAB I . PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategis Issued</i>)	8
D. Sistematika Penyajian	9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 11

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.....	11
1. Tujuan dan Sasaran	12
2. Indikator Kinerja	13
3. Strategi dan Arah Kebijakan	14
4. Program	17
B. Rencana Kinerja Tahunan	17
C. Perjanjian Kinerja	23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 27

A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran	50

BAB IV. PENUTUP 56



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023.....	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	14
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	15
Tabel 2.4	Daftar Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	17
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	18
Tabel 2.6	Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	19
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022	26
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Terkait Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	28
Tabel 3.2	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) Tentang Nilai SAKIP Malinau ..	29
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Renstra tentang Nilai SAKIP Kabupaten Malinau	30
Tabel 3.4	Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2023	32
Tabel 3.5	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 tentang Nilai SAKIP Kabupaten Malinau	33
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja setra Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) Tentang Nilai LPPD Kabupaten Malinau.....	34
Tabel 3.7	Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Renstra Tentang Nilai LPPD Kabupaten Malinau.....	35



Tabel 3.8	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 tentang Nilai LPPD Kabupaten Malinau.....	37
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Capaian Serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) tentang Indeks Kepuasan Masyarakat	38
Tabel 3.10	Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Renstra Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat	39
Tabel 3.11	Peringkat hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2023.....	40
Tabel 3.12	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan tahun 2023 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.....	42
Tabel 3.13	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Capaian Serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) tentang Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang ditindaklanjuti	43
Tabel 3.14	Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Renstra Tentang Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti.....	43
Tabel 3.15	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan tahun 2023 tentang Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	45
Tabel 3.16	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Capaian Serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) tentang Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	46
Tabel 3.17	Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Renstra Tentang Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	47
Tabel 3.18	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan tahun 2023 tentang Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	49
Tabel 3.19	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023.....	50
Tabel 3.20	Uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten malinau Tahun 2023	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	5
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon pada Akhir Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	6
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, Penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir Tahun Anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan Perencanaan Strategis yang ditetapkan. LKjIP juga



berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka sebagai wujud implementasinya diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau didukung beberapa Bagian yaitu sebagai berikut:

I. Tugas Pokok

Adapun Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;



2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasi 3

(Tiga) Kepala Bagian:

2.1. Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahi:

- a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan:
- b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
- c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:

- a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
- b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
- c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

2.3. Bagian Hukum, yang membawahi:

- a) Sub Bagian Perundang-undangan:
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga)

Kepala Bagian:

3.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi

- a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
- b) Sub Bagian Perekonomian
- c) Sub Bagian Sumber Daya Alam;

3.2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

- a) Sub Bagian Penyusunan Program
- b) Sub Bagian Pengendalian Program
- c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan



3.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Kepala Bagian:

4.1 Bagian Umum, membawahi:

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
- b) Sub Bagian Perlengkapan:
- c) Sub Bagian Rumah Tangga;

4.2 Bagian Organisasi, membawahi:

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata laksana
- c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

- a) Sub Bagian Protokol;
- b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
- c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;

4.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Pelaporan;

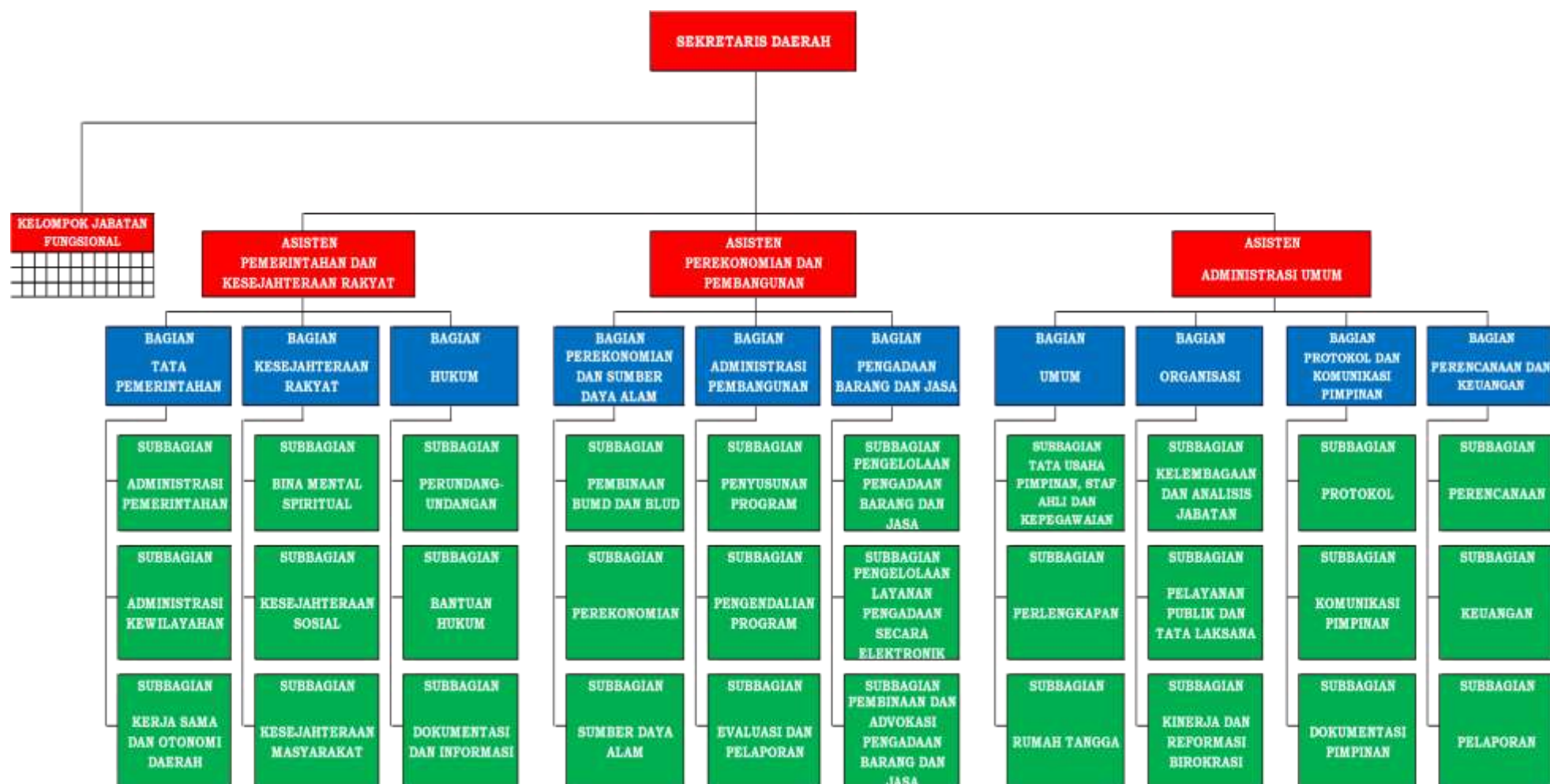
Gambaran Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dapat dilihat pada

Gambar. 2.1 dibawah ini:





Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU





Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan akhir Desember tahun 2021 memiliki aparatur sebanyak 371 orang dengan perincian 170 orang PNS dan 201 orang PTT.

Aparatur PNS yang berpendidikan S3 0 sebanyak orang, S2 sebanyak 23 orang, S1 sebanyak 78 orang, D3 sebanyak 12 orang, D2 sebanyak 1 Orang, D1 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 52 orang, dan SMP sebanyak 3 Orang. Sedang untuk PTT, yang berpendidikan S1 sebanyak 62 orang, D3 sebanyak 6 Orang, SLTA sebanyak 107 orang, SMP sebanyak 14 Orang, dan SD sebanyak 12 orang Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.1
Daftar Sumber Daya Aparatur PNS dan PTT
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					
NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Marten Dermawan, SE, M.Si	III	S2	DIKPIM III	Kepala Bagian
2.	Supriningsih, S.IP, M.Si	IV	S2	-	Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda
3.	Josonri Jemi, SH	IV	S1	-	Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda
4.	Veronica,S.Sos	IV	S1	-	Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda
5.	M.Arif, SE	-	S1	-	Analisis Pemerintahan & Otda
6	Herman Setiawan, S.AP	-	S1	-	Analisis Pemerintahan & Otda
7	Alfantius Imanuel, SE	-	S1	-	Analisis Toponimi & data Wilayah
8	Inah Paberang, S.Tr.Akun	-	S1	-	Penyusun Bahan Kebijakan
9	Fershon Wesly, S.Tr,Akun	-	S1	-	Pengelola LPPD
10	Oldy Afriani, S.TR.Akun	-	S1	-	Penyusun Bahan Kebijakan
11	Olyda Marintom G., A.Md	-	S1	-	Pengelola Adm. Pemerintahan
12	Jabaruddin	-	SMA	-	Pengadministrasian Pemerintahan



13	Sudirman	-	SMA	-	Pengadministrasian Otda
14	Nopyar Sapta Putra	-	SMA	-	Pengadministrasian Otda
15	Rahmat Hidayat	-	SMA	-	Pengadministrasian Umum
16	Ariel Lenjau	-	SMP	-	Pengadministrasian Batas Wilayah
17	Jerry, SKM	-	SMA	-	Staf
18	Elma Deswati,S.Tr.Kom	-	S1	-	Staf

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Jon Ifung, S.Sos.,MM	III	S2	Dikpim III	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Kasransyah, SE,M.Si	IV	S2	Dikpim IV	Analisis Kebijakan Muda
3.	Dorthi Agiviola, SE	IV	S1	Dikpim IV	Analisis Kebijakan Muda
4.	Margeritha, SE	IV	S1		Analisis Kebijakan Muda
5.	Saparyani, SE		S1		Staf Sub Bag Kesejahteraan Sosial
6.	Jurya Kuleh, SE		S1		Staf Sub Bag Bina Mental Spiritual
7.	Elis Sri Mulyati, SE		S1		Staf Sub Bag Kesejahteraan Masyarakat
8.	Susidona, S. Tr. Akun.		D4		Staf Sub Bag Kesejahteraan Sosial
9.	Marson		SMA		Staf Sub Bag Bina Mental Spiritual
10	Rusdiansyah		SMA		Staf Sub Bag Kesejahteraan Masyarakat
11.	Mariana Anyie		D1		Staf Sub Bag Kesejahteraan Sosial

BAGIAN HUKUM

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Jemi, SH.M.Si	III.a	S2	DIKPIM. III	Kepala Bagian Hukum
2.	Indra Malawati, SE.,M.H	IV.a	S2	PRAJAB	Kasubbag Perundang-Undangan
3.	Sumiyati, SH.	IV.a	S1	DIKPIM IV	Kasubbag Bantuan Hukum



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

4.	Evahar, SH.	IV.a	S1	PRAJAB	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi
5.	Evi Agreta, SH	-	S1	PRAJAB	Penyusun Peraturan Perundang-undangan
6.	Septemsi, SE	-	S1	PRAJAB	Analisis Permasalahan Hukum
7.	Dar Apriner,SH	-	S1	PRAJAB	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum
8.	M.Ichwan. MT,SE	-	S1	PRAJAB	Penyusun Bahan Bantuan Hukum
9.	Pangeran Amriko, SH	-	S1	PRAJAB	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
10.	Ivonna,A.Md	-	D-III	PRAJAB	Pengadministrasian data Perundang-undangan
11.	Eko Yuono	-	SMA	PRAJAB	Pengadministrasian Hukum
12.	Heni Sartika	-	SMA	PRAJAB	Pengadministrasian Hukum
13.	Darmayanti	-	SMA	PRAJAB	Pengadministrasian data Perundang-undangan
14.	Johan, SH, MH	-	SMA	PRAJAB	Analisis Produk Hukum

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Erly Sumiati, Se,M.,Si	III/a	S2	DIKPIM. III	Kepala Bagian Ekonomi
2.	Ronald BP Simbolon,SP	IV/a	S1	DIKPIM IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3.	Nella Risa,S.Hut,M.Si	IV/a	S2	DIKPIM IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4.	Alfenews, SE	IV/a	S1	DIKPIM IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	Aryathi,SE	-	S1	PRAJAB	Penelaahan Data Sumber Daya Alam
6.	Eko Januar,SE	-	S1	PRAJAB	Penelaahan Perkembangan BUMD
7.	Sri Murni Purba,S.Tr.Akun	-	S1	PRAJAB	Analisis Perekonomian
8.	Heldy Fitriyanto	-	SLTA	PRAJAB	Pengadministrasian Umum
9.	Susi Yanti	-	SLTA	PRAJAB	Analisis Perekonomian
10.	Ester Ngau	-	D-3	PRAJAB	Analisis Perekonomian
11.	Heriyanto	-	SLTA		Pengadministrasian Umum
12.	Ajan Agrifa	-	SLTA		Analisis Pembinaan BLU



BAGIAN : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Dhani Subroto, S.Hut., M.Si	III.a	S2	Dikpim III	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
2.	Ronald Pirade, S.Hut,M.AP	IV.a	S2	Dikpim IV	Fungsional Perencana Ahli Muda
3.	Yudith Rantepadang, SE,M.AP	IV.a	S2	Dikpim IV	Fungsional Perencana Ahli Muda
4.	Megawati, SE	IV.a	S1	Dikpim IV	Fungsional Perencana Ahli Muda
5.	Nurmansyah	-	SLTA	Prajabatan Gol.II	Pengelola Program dan Laporan
6	Agnesnita Ujang	-	SLTA	Prajabatan Gol.II	Pengadministrasian Umum
7.	Eliyanti Geno Payangan	-	Diploma 3	Prajabatan Gol5II	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
8.	Miriy	-	SLTA	Prajabatan Gol.II	Analisis Pengelola Data
9.	Eka Pradila Fitriani, ST	-	SLTA	-	Staf
10.	Rudi Apriliansyah, S.Hut	-	SLTA	-	Staf
11.	Asman	-	SLTA	-	Staf

BAGIAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Totok Setyawan, St., M.Si	IV.a	S2	LPJ, PIM IV	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Alfian, SE., M.Si	IV.a	S2	LPJ, PIM IV	Fungsional Ahli Muda
3.	Arief Budiman, S.Kom, M.Kom	IV.a	S2	LPJ	Fungsional Ahli Muda
4.	Arbain, SE	III/b	S1	LPJ	Fungsional Ahli Muda
5.	Dhian Ardi Setyaning, SH	III/c	S1	LPJ	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa
6.	Rio Samsul Bakhri, ST	III/b	S1	LPJ	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis
7.	Prasetya Efendi	III/a	S1	LPJ	Pengendali Teknologi Informasi
8.	Eka Rostina Yus, SH	III/a	S 1	LPJ	Penelaah Kebijakan Pengadaan barang dan jasa



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

9.	Mulyanto, A.Md	III/a	D III	LPJ	Perancang Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa
10.	Gatot Wisnu Wibowo, S.Tr.Bis	III/a	D III	LPJ	Pengendali Teknologi Informasi
11.	Agustinus	III/a	SMU	LPJ	Pengadministrasian Umum
12.	Ruliansyah	II/d	SMU	LPJ	Pengadministrasian Umum
13.	Linda Nispurita Sari	II/c	SMU	LPJ	Pengelola Layanan pengadaan barang dan jasa
14.	John Kenedi, A.Md	II/c	SMU	LPJ	Pengelola Layanan pengadaan Barang dan jasa

BAGIAN UMUM

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1	Matias Seradu, S.Sos., M.AP	III.a	S1	PIM III	Kepala Bagian Umum
2	Yulius, SE	IV.a	S1	PRAJAB	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
3	Ruslan, S.E., M.Si	IV.a	S2	PRAJAB	Kasubbag Rumah Tangga
4	Yanufur, SH	IV.a	S1	PRAJAB	Kasubbag Perlengkapan
5	Pentawati Fitri, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
6	Berahim Zunaidi, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
7	Sri Wiyanti, SKM., M.P.H	-	S1	PRAJAB	Staf
8	Nur Azlina, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
9	Helmine, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
10	Septi Lampang, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
11	Helen Mawuntu, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
12	Romelda Busak, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
13	Pistoni, S.Sos	-	S1	PRAJAB	Staf
14	Aprina Ipui, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
15	Jeri Yantoni, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
16	L. Edison Fridrich, SE	-	S1	PRAJAB	Staf
17	Alex Bin Amsir, S.Mn	-	S1	PRAJAB	Staf
18	Desi Susanthi, SH	-	S1	PRAJAB	Staf
19	Wilson Lulu, SH	-	S1	PRAJAB	Staf
20	Muhamad Rifai	-	SMA	PRAJAB	Staf
21	Jamres	-	S1	PRAJAB	Staf
22	Marsel Lagan	-	S1	PRAJAB	Staf
23	M. Ali Yafi	-	SMA	PRAJAB	Staf
24	Safranto	-	SMA	PRAJAB	Staf
25	Siti Fatiah, A.Md	-	S1	PRAJAB	Staf
26	Yulhelvisiana	-	SMA	PRAJAB	Staf



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

27	Siti Hajar	-	SMA	PRAJAB	Staf
28	Jones Gung, A.Ma	-	D2	PRAJAB	Staf
29	Idrus Andre	-	SMA	PRAJAB	Staf
30	Ester Merang	-	SMA	PRAJAB	Staf
31	Firmansyah Markus	-	SMA	PRAJAB	Staf
32	Salau	-	SMA	PRAJAB	Staf
33	Jemmi	-	SMA	PRAJAB	Staf
34	Budiyanto	-	SMA	PRAJAB	Staf
35	Ilham	-	SMA	PRAJAB	Staf
36	Jamalludin	-	SMA	PRAJAB	Staf
37	Rosarina Suyud	-	SMA	PRAJAB	Staf
38	Normansyah	-	SMA	PRAJAB	Staf
39	Roben Dawat	-	SMA	PRAJAB	Staf
40	Tabeta	-	SMA	PRAJAB	Staf
41	Wenes	-	SMA	PRAJAB	Staf
42	Bawe	-	SMP	PRAJAB	Staf
43	M. Ishak	-	SMP	PRAJAB	Staf
44	Jerry, S.KM	Honor Harian Lepas	S1	-	Tapem
45	Elma Deswati, S.Tr.Kom	Honor Harian Lepas	S1	-	Tapem
46	Muhammad Habibi, SH	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
47	Graf Margareta, S.Si	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
48	Aji Safitri, S.Si	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
49	Adventa Ruth Angelina	Honor Harian Lepas	SMA	-	Prokompim
50	Arum Wulandari, S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
51	Susi Jamria, SH	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
52	Ajang Laing, A.Md	Honor Harian Lepas	D3	-	Prokompim
53	Rukia	Honor Harian Lepas	SMA	-	Prokompim
54	Alpinus, S.IP	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
55	Agus Eko Prasetyo	Honor Harian Lepas	SMA	-	Prokompim
56	Raihana, S.Pd	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
57	Theresia Wilson	Honor Harian Lepas	SMA	-	Prokompim
58	Roni Aldiki, S.H	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
59	Pipin Pratiwi, S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
60	Rio Sulistio Obed Nego	Honor Harian Lepas	SMA	-	Prokompim
61	Cetherin Natalia, S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
62	Titin Veronika, S.M	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

63	Pitriani, S.P	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
64	Sandy Setyawan, S.T	Honor Harian Lepas	S1	-	Prokompim
65	Eka Pradila Fitriani, S.T	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Pembangunan
66	Rudi Apriliansyah, S.Hut	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Pembangunan
67	Asman, A.Md	Honor Harian Lepas		-	Bagian Pembangunan
68	Efendi, S.Ip	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Perencanaan & Keuangan
69	Sahdia Marwati	Honor Harian Lepas	SMA	-	Bagian Perencanaan & Keuangan
70	Regina	Honor Harian Lepas	SMA	-	Bagian Perencanaan & Keuangan
71	Andryono, S.Kom	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
72	L.Alam Taufan, S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
73	Mariam Ibau, A.Md	Honor Harian Lepas	D3	-	Bagian Umum
74	Lakai, Se	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
75	Abidin	Honor Harian Lepas	SMA	-	Bagian Umum
76	Arpi Arneki, S.Par	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
77	Dewi Susanti, SE	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
78	Aprilisa Azalia	Honor Harian Lepas	SMA	-	Bagian Umum
79	Virawathy	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
80	Leo Riski Ricardo	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Hukum
81	Marco Yosua Junior, S.H	Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Hukum
82	Dones Oktavian	Honor Harian Lepas	SMA	-	Kantor Kecamatan Malinau Kota
83	Yudanles, S.Pd	Honor Harian Lepas	S1	-	KPU
84	Welly, S.IP	Honor Harian Lepas	S1	-	KPU
85	Gerdon, S.Kom	Honor Harian Lepas	S1	-	KPU
86	Edi Nohendra	Honor Harian Lepas	SMA	-	KPU
87	Megaselvina, SH	Honor Harian Lepas	S1	-	KPU
88	Patimah Wati	Honor Harian Lepas	SMK	-	Dukcapil
89	Noviana Angrena Ojis	Honor Harian Lepas	SMA	-	Dukcapil
90	Arun Njau, S.IP	Honor Harian Lepas	S1	-	Perpustakaan Dan Kearsipan
91	Eva Christina	Honor Harian Lepas	SMU	-	Perpustakaan Dan Kearsipan
92	Sri Maryani, S.E	Honor Harian Lepas	S1	-	Perpustakaan Dan Kearsipan
93	Juliana	Honor Harian Lepas	SMA	-	Perpustakaan Dan Kearsipan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

94	Rian Andi Saputra, S.IP	Honor Harian Lepas	S1	-	Perpustakaan Dan Kearsipan
95	Heti Anggraini	Honor Harian Lepas	SMA	-	Perpustakaan Dan Kearsipan
96	Dwi Fitria, SKM	Honor Harian Lepas	S1	-	DP3AS
97	Nicollin Isadora Natasha, SE	Honor Harian Lepas	S1	-	DP3AS
98	Jones	Honor Harian Lepas	SMA	-	DLH
99	Merry Bangke,S.PAK	Honor Harian Lepas	S1	-	Dinas Pendidikan
100	W.Otnel Ferry, S.Th	Honor Harian Lepas	S1	-	Dinas Pendidikan
101	Dewi Maryati	Honor Harian Lepas	SMA	-	Dinas Pendidikan
102	Nurbiah	Honor Harian Lepas	SMA	-	Dinas Pendidikan
103	Herlinawati, S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Perwakilan Kecamatan Kayan Hilir Long Sule
104	Novi, S.M	Honor Harian Lepas	S1	-	Perwakilan Kecamatan Kayan Hilir Long Sule
105	Sherli Juniati, SE	Honor Harian Lepas	S1	-	BKPP
106	Sony Kristianto,S.IP	Honor Harian Lepas	S1	-	BKPP
107	Marita Tasa, S.Tr. Kom	Honor Harian Lepas	D4	-	BKPP
108	Riti Devianati	Honor Harian Lepas	SMA	-	Kesbangpolinmas
109	Supian,S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Bappeda
110	Marcelina Samara, A.Md	Honor Harian Lepas	D3	-	Bappeda
111	Eddy Alri Sander,S.Sos	Honor Harian Lepas	S1	-	Bappeda
112	Aun Yan,S.Tr.Kom	Honor Harian Lepas	D4	-	Bappeda
113	Hengki Deskadel Ablelo,S.Pd	Honor Harian Lepas	S1	-	Bappeda
114	Virga Dwi Yanthi,S.Psi	Honor Harian Lepas	S1	-	Inspektorat
115	Reki, S.Pd	Honor Harian Lepas	S1	-	Ketenagakerjaan
116	Robiatul Awaliya, S.Pd	Honor Harian Lepas	S1	-	Dinas Pemuda Dan Olahraga
117	Dila Oktaria	Honor Harian Lepas	SMU	-	Dinas Pemuda Dan Olahraga
118	Rusmansyah, S.E	Honor Harian Lepas	S1	-	Dinas Pemuda Dan Olahraga
119	Mega Novita Sari, S.H	Honor Harian Lepas	S1	-	Analisis Produk Hukum (Banwaslu)
120	Gugik Diego Anggana,S,H	Honor Harian Lepas	S1	-	Analisis Produk Hukum (Banwaslu)
121	Zulian Slamet Santoso	Honor Harian Lepas	S1	-	Administrasi Keuangan (Banwaslu)
122	Welson, S.H	Honor Harian Lepas	S1	-	Analisis Produk Hukum (Banwaslu)
123	Ade Victor, St.K3	Honor Harian Lepas	S1	-	PTSP
124	Doni Libun	Honor Harian Lepas	S1	-	SDN 004 Masihu



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

125	Erick Kristian Siagian, S.H	Honor Harian Lepas	S1	-	Rumah Dinas Bupati
126	Ellen Grace	Tenaga Honor Harian Lepas	S1	-	Bagian Umum
127	Maiwati	Tenaga Honor Harian Lepas	SMA	-	Bagian Umum
128	Sri Sumiathi	Tenaga Honor Harian Lepas	SD	-	Bagian Umum
129	Piet Edvine Sangian	Tenaga Honor Harian Lepas	SMA	-	Asrama Mahasiswa Yogyakarta
130	Fahjri	Tenaga Honor Harian Lepas	SMA	-	Kantor Perwakilan Kabupaten Malinau Di Tarakan
131	Didik Dinamik	Tenaga Honor Harian Lepas	SLTA	-	Penghubung Kab.Malinau Di Jakarta)
132	Syahrial	Petugas Keamanan	SLTP	-	Kantor Penghubung Perwakilan Malinau Di Jakarta
133	Ngatemin	Petugas Keamanan	SLTP	-	Kantor Penghubung Perwakilan Malinau Di Jakarta
134	Sumadi	Petugas Keamanan	SLTP	-	Asrama Putra Kabupaten Malinau Di Yogyakarta
135	Edy Suyono	Petugas Keamanan	SMA	-	Kantor Perwakilan Kabupaten Malinau Di Tarakan
136	Agustinus Arisandi	Petugas Keamanan	SLTA	-	Kantor Perwakilan Kabupaten Malinau Di Samarinda
137	Roslinda Kerigon Tukan	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Rumah Jabatan Bupati
138	Nurhaidah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Rumah Jabatan Bupati
139	Sunarti	Tenaga Kebersihan	SMU	-	Rumah Jabatan Bupati
140	Junaidi	Tenaga Kebersihan	SMU	-	Rumah Jabatan Bupati
141	Pauri Rining	Tenaga Kebersihan	S1	-	Rumah Jabatan Bupati
142	Fendi Yesaya	Tenaga Kebersihan	SD	-	Rumah Jabatan Bupati
143	Alpiansyah	Tenaga Kebersihan	SMA	-	Rumah Jabatan Bupati
144	Mohamad Marjuki	Tenaga Kebersihan	SMA	-	Rumah Jabatan Bupati
145	Alpian	Tenaga Kebersihan	SD	-	Rumah Jabatan Bupati
146	Hamdani	Tenaga Kebersihan	S1	-	Rumah Jabatan Bupati
147	Raen	Tenaga Kebersihan	SMP	-	Rumah Jabatan Bupati
148	Satinah	Tenaga Kebersihan	SMU	-	Rumah Jabatan Bupati
149	Ester	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Rumah Jabatan Sekda
150	Maikal	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Rumah Jabatan Sekda
151	Andervan	Outsourcing	D-III	-	Bagian Umum
152	Chalmers	Outsourcing	SMK	-	Bagian Umum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

153	Djohansyah	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
154	Gipson	Outsourcing	SMK	-	Bagian Umum
155	Jonni Oktavianus Martinus	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
156	Juari	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
157	Kasriansyah	Outsourcing	SMK	-	Bagian Umum
158	Marlinda Irawati	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
159	Marten	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
160	Mastoni	Outsourcing	S1	-	Bagian Umum
161	Muhammad Sukri	Outsourcing	SMP	-	Bagian Umum
162	Nasution	Outsourcing	SMP	-	Bagian Umum
163	Padan Yahuda	Outsourcing	SD	-	Bagian Umum
164	Rama Mulyadi	Outsourcing	SD	-	Bagian Umum
165	Viron	Outsourcing	SMK	-	Bagian Umum
166	Yohanis	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
167	Yotam Pabiang	Outsourcing	SMA	-	Bagian Umum
168	Ardianus Ovan	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
169	Anggelus Senggeng	Tenaga Kebersihan	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
170	Agus Wulandari	Tenaga Kebersihan	SMK	-	Gedung Gabungan Dinas
171	Edy Marwan	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
172	Giso Hendrianus	Tenaga Kebersihan	SMP	-	Gedung Gabungan Dinas
173	Jeri Maijefrison	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
174	Juathi	Tenaga Kebersihan	SD	-	Gedung Gabungan Dinas
175	Marthinus	Tenaga Kebersihan	SD	-	Gedung Gabungan Dinas
176	Maryanti	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
177	Nanik Yuliani	Tenaga Kebersihan	SD	-	Gedung Gabungan Dinas
178	Okky Risandra	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
179	Patimah	Tenaga Kebersihan	SLTP	-	Gedung Gabungan Dinas
180	Putri Laili	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
181	Sapri	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
182	Suryati	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
183	Susilawati	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
184	Yessi Vike Yanti	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Gedung Gabungan Dinas
185	Yovita Enjung	Tenaga Kebersihan	SLTP	-	Gedung Gabungan Dinas
186	Riska	Tenaga Kebersihan	SD	-	Gedung Gabungan Dinas



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

187	Riferliana	Tenaga Kebersihan	SMP	-	Gedung Gabungan Dinas
188	Rudiansyah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
189	Gregorius Gildas	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
190	Shelly Yuliana W	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
191	Charlos Berlin B	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
192	Karmila	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
193	Rendi Stenly	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
194	Rully Yuliant P	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
195	Kornalia Mustika R	Tenaga Kebersihan	SD	-	Kantor Bupati Malinau
196	Seri Isriani	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
197	Zohari	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
198	Yohanes Ilit	Tenaga Kebersihan	D3	-	Kantor Bupati Malinau
199	Hasniah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
200	Susanti Laing	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
201	Masri	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
202	Lusi Lah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
203	Middin	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
204	Taufik Ardiansyah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
205	Iskandar	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
206	Muhammad Apil	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
207	Purwati Ningsih	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
208	Dediansyah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
209	Muzaiyin Rahman	Tenaga Kebersihan	S-1	-	Kantor Bupati Malinau
210	Andriyadi Saputra	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
211	Muhammad Yasri	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
212	Rachmadi	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
213	Putra Ananda	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
214	Muhamadin	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
215	Sri Rahayu	Tenaga Kebersihan	SLTP	-	Kantor Bupati Malinau
216	Arief Cahyono P	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
217	Surmadia Barek	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

218	Ardiansyah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
219	Rudiansyah	Tenaga Kebersihan	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
220	Ariyanto	Tenaga Kebersihan Taman	SD	-	Kantor Bupati Malinau
221	Ary Kurniawan	Tenaga Kebersihan Taman	SLTP	-	Kantor Bupati Malinau
222	Tony	Tenaga Kebersihan Taman	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
223	Darmansyah	Tenaga Kebersihan Taman	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
224	Marjebi	Tenaga Kebersihan Taman	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
225	Marjuanto	Tenaga Kebersihan Taman	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
226	Syahrin	Tenaga Kebersihan Taman	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
227	Yoko Harianto	Tenaga Kebersihan Taman	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
228	Nahaniah	Tenaga Kebersihan Taman	SMA	-	Kantor Bupati Malinau
229	Orpa Delila	Tenaga Kebersihan Taman	SMA	-	Kantor Bupati Malinau
230	Kolekta Efi	Tenaga Kebersihan	SMP	-	Gedung Diklat
231	Carmelia Esmerida E	Tenaga Kebersihan	SMA	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
232	Abdurracman	Tenaga Kebersihan	SMA	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
233	Lutter	Tenaga Kebersihan	SD	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
234	David Payong B	KOORDINATOR (CS)	SMA	-	Bagian Umum
235	Makdalena	KOORDINATOR (CS)	SMA	-	Bagian Umum
236	Agus Trisetiyono	KOORDINATOR (TAMAN)	SMA	-	Bagian Umum
237	Sabran	KOORDINATOR (CS)	SMA	-	Bagian Umum
238	Joko Sunaryo	Tenaga Mekanikal Engineering	SLTA	-	Kantor Bupati Malinau
239	Suryo Cahyono	Tenaga Mekanikal Engineering	SMA	-	Kantor Bupati Malinau
240	Hendra Rahmat	Tenaga Mekanikal Engineering	SMK	-	Kantor Bupati Malinau



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

241	Alfianus	Tenaga Mekanikal Engineering	SMP	-	Kantor Bupati Malinau
242	Patawari	Tenaga Kebersihan Taman	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
243	Dionisius K.Tupen	Tenaga Kebersihan Taman	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
244	Charles Bali Atasoge	Tenaga Kebersihan Taman	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
245	Widayat	Tenaga Mekanikal Engineering	STM	-	Gedung Gabungan Dinas
246	Riduwansyah	Tenaga Mekanikal Engineering	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
247	Hendry	Tenaga Mekanikal Engineering	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
248	Abdul Hafids	Tenaga Mekanikal Engineering	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas
249	Alfonsius	Tenaga Mekanikal Engineering	SMA	-	Gedung Gabungan Dinas

BAGIAN ORGANISASI

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Dr. Franklin, SP, M.Si	III/a	S3	Dikpim III	Kepala Bagian Organisasi
2.	Ahmed Chari Syafaadi, Sp	IV/a	S1	Dikpim IV	Fungsional Perencana Ahli Muda
3.	Samuel, S.Sos ,M.Si	IV/a	S2		Fungsional Kepegawaian Ahli Muda
4.	Suharningsi,Se M.Si	IV/a	S2		Fungsional Kebijakan Ahli Muda
5.	Farwan,Se		S1		Analisis Kinerja
6.	Alfian Nur Atthariq, S.Ip		S1		Analisis Kelembagaan
7.	Mursadiq, S.Sos		S1		Analisis Jabatan
8.	Septi Juani Alung		SLTA		Pengadministrasi Umum
9	Mohamad Fadhlil		SLTA		Pengadministrasi Umum
10	Siprianus Sili Ola,A.Md		D3		Staf

BAGIAN : PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Daniel Daring Balang	III.a	S2	Dikpim III	Kepala Bagian PROKOMPIM
2.	Jesiska Willius, S.STP	IV.a	S1	Dikpim IV	Kepala Sub Bagian Protokol
3.	Andry Wira Pratama Putra,S.STP	IV.a	S1	Dikpim IV	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
4.	Dede Cledwin, S.IP	IV.a	S1	Dikpim IV	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
5.	Leo Charles, S.Pd	-	S1	-	Staf Pelaksana Protokol
6.	Cerianita Dwi Yanti, S.STP	-	S1	-	Staf Pelaksana Protokol
7.	Sa'Diah	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Protokol
8.	Yohanes	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Protokol
9.	Bahari, Str. Akun	-	S1	-	Staf Pelaksana Protokol
10.	Agustinah	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Protokol
11.	Susilawati	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Protokol
12.	Ramli	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Dokpim
13.	Oktavianus, SH	-	S1	-	Staf Pelaksana Dokpim
14.	Noor Halik	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Dokpim
15.	Joni Bisa	-	SLTA	-	Staf Pelaksana Dokpim
16.	Sutarmi S, SE, M.Si	-	S2	-	Adc. Wakil Bupati
17.	Martiani Ubang, S.I Kom	-	S1	-	Staf Pelaksana Kompim
18.	Tria Hilda, S.IP	-	S1	-	Adc. Bupati
19.	Haryadi, S.STP	-	S1	-	Adc. Wakil Bupati
20.	Daniel S.STP	-	S1	-	Adc. Bupati
21.	Sisca Resthanty Siagian S.A.P	-	S1	-	Staf Pelaksana Kompim

BAGIAN : PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	NAMA	ESELON	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Kartini, S.E., Ak., M.Si	III.a	S2	Diklat PIM 3	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan



2.	Tamrin Hakim, SE	IV.a	S1	PRAJAB	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda
3.	Adriana, SE	IV.a	S1	PRAJAB	Fungsional Perencana Ahli Muda
4.	Yayan Setiawan,S.Sos	IV.a	S1	PRAJAB	Fungsional Perencana Ahli Muda
5.	Yudaningtyas Ari Nugraheni, S.E	-	S1	Prajabatan Gol.III	Pelaksana
6.	Emi Oktariana, A.Md	-	D3	Prajabatan Gol.II	Pelaksana
7.	Junaidino Kodon, A.Md	-	D3	Prajabatan Gol.II	Pelaksana
8.	Maria Isi	-	SMA	Prajabatan Gol.II	Pelaksana
9	Efendi,S.IP	-	S1	-	Staf
10.	Regina	-	SLTA	-	Staf
11.	Edi Nohendra	-	SLTA	-	Staf

C. Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2022:

- 1 Banyaknya Proritas Kegiatan namun terkendala waktu, Sarana mobilitas dan keterbatasan personil. Misalnya untuk Kegiatan Koordinasi dan Monitoring.
2. Masih Kurangnya Koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah. Hal ini perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
3. Adanya perubahan regulasi di Tingkat Pusat sehingga perlu untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) meliputi 4 (Empat) Bab sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
- C. Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Arah Kebijakan
 - 4. Program
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022 merupakan Awal pelaksanaan RENSTRA dan Renstra Tahun 2021-2026. Selanjutnya RENSTRA dijabarkan kedalam RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1 (Satu) sampai 5 (Lima) Tahun sehubungan dengan Tugas dan Fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan Strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Didalam Renstra digambarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis. OPD melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Adapun Visi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera

Didukung Pemerintahan yang Profesional”

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 untuk mencapai Visi tersebut dituangkan ke dalam 4 (Empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal



3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Proses Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah Dokumen yang merupakan alat Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang menjadi tolak ukur kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
- Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Selanjutnya Sekretariat Daerah menjabarkan dalam Sasaran-Sasaran Strategis yang akan dicapai secara Tahunan selama periode Renstra. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					Unit Kerja Penanggungjawab
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	64,20	67,10	69,15	72,50	75,25	Bag.Adpem, Baperkeu, BPBJ, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bag.Prokomin, Bag. Umum
			Nilai LPPD	2,930	2,950	2,960	2,980	3,000	Bagian Tapem



		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai IKM	81	85	88	88,31	88,50	Bagian Organisasi
2	Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
3	Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pengawasan kebijakan pembangunan ekonomi daerah fokus pada potensi daerah.	Persentase pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Instansi Pemerintah sesuai dengan Tugas, Fungsi serta Mandat yang diemban. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Malinau	Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD Kabupaten Malinau	Bagian Tata Pemerintahan
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi



3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Meningkatnya Pengawasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Fokus pada Potensi Daerah.	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.	Bagian Perekonomian dan SDA

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah Arah/Tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasarannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau memiliki beberapa Strategi dan Arah Kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional						
MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	2		3		4	
Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	1	Meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap administrasi penyaluran hibah dan bansos yang tertib dan taat administrasi	1	Meningkatkan Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi Bidang Kesra
			2	Peningkatan mutu sumber daya manusia bidang keagamaan	2	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kreatifitas bidang keagamaan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan moral, etika, budi pekerti, karakter kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan dimasyarakat
MISI II : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan	



1	2		3		4	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada potensi dan karaktersitik lokal	1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pertanian serta ketersediaan Pangan yang layak bagi Masyarakat	1	Meningkatkan Fasilitas Program RASDA Plus
	2	Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah	2	Peningkatan yang bersifat Koordinasi dan Pengawasan kepada lembaga Usaha Mikro Kecil, BUMD dan Pelaku Usaha Ekonomi	2	Meningkatkan Koordinasi dan Pengawasan Perekonomian dalam Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi
MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
1	2		3		4	
Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif dan efisien	1	Peningkatan kualitas dokumen SAKIP seluruh perangkat daerah
			2	Meningkatkan kemudahan entry data LPPD lewat aplikasi	2	Peningkatan kualitas data LPPD



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3	Mengoptimalkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah	3	Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa
			4	Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah	4	Peningkatan produk hukum yg diselesaikan secara tepat waktu
Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	1	Meningkatnya kualitas tata laksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencapaian indikator pelayanan minimal	1	Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik pemerintah daerah



4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan. Program-Program yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Program Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Nama Program Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Perekonomian dan Pembangunan
3	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang Tingkat Capaian Kinerja yang diinginkan serta target (*Quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan Program/Kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan Target Kinerja Tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Sekretariat Daerah menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Sekretariat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan RENJA.

Rencana Kinerja Tahunan 2022 mencerminkan Rencana Kegiatan, Program dan Sasaran Tahunan serta menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Sekretariat Daerah selama tahun 2022, Target kinerja merepresentasikan Nilai Kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua Indikator Kinerja yang melekat pada tingkat Kegiatan maupun Sasaran Tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran dijadikan Tolak Ukur dalam mengukur keberhasilan Organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP Kabupaten Malinau	Nilai	64,20
		2. Nilai LPPD Kabupaten Malinau	Nilai	2,930
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	Persentase	100%
4.	Meningkatnya Pengawasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Fokus pada Potensi Daerah.	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.	Persentase	100%



Adapun Rencana Kerja terhadap Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Program	Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 buku	Rp. 99.999.500
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 OPD	Rp. 93.058.900
		3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	130 buku	Rp. 140.000.000
		4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	Rp. 39.178.000
		5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 kali	Rp. 12.000.000
		6. Penyediaan Bahan/Material	20 jenis	Rp. 75.000.000
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	Rp. 149.159.000
		8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	Rp. 30.000.000
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp. 149.999.700
		10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	Rp. 48.290.000
		11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	Rp. 6.510.000
		12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	Rp. 49.994.750
		13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	Rp. 16.000.000



	14. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60 Dokumen	Rp. 19.702.000
	15. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 OPD 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 9 OPD	Rp. 664.889.800
	16. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	56 orang 1 dokumen 37 opd 52 opd 52 opd 8 orang 15 opd	Rp. 306.194.500
	17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kali	Rp. 98.201.000
	18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 jenis	Rp. 59.964.000
	19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kali	Rp. 99.405.000
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	Rp. 20.593.000
	21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Buku	Rp. 200.000.000
	22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp. 90.000.000
	23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 buku	Rp. 80.000.000
	24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	Rp. 193.843.000



		25. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp. 199.994.000
		26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	Rp. 49.974.000
		27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Rp. 49.968.000
		28. Fasilitas Keprotokolan	4 Jenis 2 Jenis	Rp. 179.890.000
		29. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	5 Kecamatan	Rp. 108.460.000
		30. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Buku 1 Buku 5 media 155 M2	Rp. 2.060.460.000
		31. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 jenis 4 jenis	Rp. 123.633.000
		32. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	Rp. 67.957.000
		33. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	Rp. 200.992.000
		34. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Kegiatan	Rp. 598.990.000
		35. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Rp. 199.754.000
		36. Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	Rp. 298.789.000
		37. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Rapat	Rp. 99.358.000
		38. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	Rp. 4.714.305.000
		39. Pengadaan Mebel	6 Item	Rp. 199.930.300
		40. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Pekerjaan	Rp. 1.099.989.312



		41. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp. 6.804.680.012
		42. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 182.581.000
		43. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp. 2.552.818.968
		44. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	Rp. 561.994.600
		45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Kegiatan	Rp. 399.993.000
		46. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Kegiatan	Rp. 6.524.871.250
		47. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Kegiatan	Rp. 2.526.914.000
		48. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Kegiatan	Rp. 1.021.759.000
		49. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Rumah	Rp. 851.097.900
2.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4 Kecamatan 12 Perda	Rp. 204.999.600
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Perkara 2 Kelompok 9 OPD	Rp. 224.792.750
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 Aplikasi 22 Produk	Rp. 189.998.850
		4. Penataan Administrasi Pemerintahan	18 Jenis	Rp. 29.983.000
		5. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	25 Kegiatan	Rp. 900.000.000



		6. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40 Kegiatan	Rp. 10.722.507.000
		7. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	500 Orang	Rp. 2.068.028.000
		8. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	30 Kegiatan	Rp. 260.132.000
		9. Penataan Administrasi Pemerintahan	22 Jenis	Rp. 40.000.000
		10. Penataan Administrasi Pemerintahan	25 Jenis	Rp. 36.135.000
		11. Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Kecamatan 1 Kegiatan	Rp. 349.310.000
		12. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Kecamatan	Rp. 98.380.000
		13. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Laporan 5 Jenis	Rp. 194.985.000
3.	Perekonomian dan Pembangunan	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	12 kali	Rp. 255.000.000
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 kecamatan	Rp. 334.940.925
		3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	Rp. 99.937.000
		4. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	14 Mbps dedicated 20 Mbps 1 aplikasi	Rp. 475.021.700
		5. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110 Orang 16 Orang	Rp. 480.960.000



	6. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 BUMD,BLUD	Rp. 219.335.000
	7. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1000.2304 kl.tabung 1 Laporan 13 kali	Rp. 569.976.000
	8. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Laporan	Rp. 77.191.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu Dokumen Kontrak Kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Bupati Malinau untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2023 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencerminkan Rencana Kegiatan, Program, dan Sasaran Tahunan. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan Target Kinerja yang hendak dipakai Sekretariat Daerah selama Tahun 2023. Target Kinerja merepresentasikan Nilai Kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua Indikator Kinerja yang melekat pada tingkat Kegiatan maupun Sasaran Tahunan Target Kinerja. Tingkat sasaran dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 38/DPA/2023.. Perubahan Anggaran tercantum dalam Dokumen Perubahan Anggaran Nomor 168/DPPA/2023 yang ditetapkan pada tanggal 2 Nopember 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ernes Silvanus, S.Pi. MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : Wempi W. Mawa, SE

Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 3 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Wempi W. Mawa, SE,M.H

Dr. Ernes Silvanus, S.Pi.,MM
NIP. 19740914 199803 1 002



Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Malinau	64,20
		Nilai LPPD Kabupaten Malinau	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
3	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		APBD
2	Perekonomian dan Pembangunan		APBD
3	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		APBD
JUMLAH			



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Apabila semakin tinggi realisasi, maka menunjukkan semakin tingginya Kinerja atau semakin rendah Realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Penilaian Capaian Kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran menggunakan Interpretasi Penilaian dengan pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja yaitu:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat rendah



A. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur Capaian Kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian Kinerja Terkait Pencapaian Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	64,20	60,02	93,48
Nilai LPPD	Nilai	2,930	-	-

1. Nilai SAKIP

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 62,04 atau Predikat B.



Tabel
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	67,10	62,04	92,46%

Sumber : Bagian Organisasi dan Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nilai SAKIP	Nilai	62,04	56,32	57,14	60,02	90,78%	92,10%	96,74%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 62,04 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 56,32 atau realisasi capaian kinerja sebesar 90,78%, realisasi tahun 2021 sebesar 57,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 92,10% dan realisasi tahun 2022 sebesar 60,02 atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,74%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 10,15% terhadap capaian kinerja tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 8,58% terhadap capaian capaian



tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 3,36 terhadap capaian kinerja 2022 .

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	62,04	75,25	82,44

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 62,04 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 75,25, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja nilai SAKIP sebesar 82,44% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result orientid government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukan bahwa nilai sebesar 62,04 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada



pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2023
A. Perencanaan Kinerja	30%	23,87
B. Pengukuran Kinerja	30%	16,28
C. Pelaporan Kinerja	15%	10,15
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,14
Nilai Hasil Evaluasi	100%	62,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Kemenpan RB Tahun 2023

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun belum memenuhi atau mencapai target capaian kinerja tahun 2023. Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi atau penyebab capaian kinerja belum tercapai yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

- Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki indikator kinerja yang belum memenuhi SMART-C.
- Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya memperhatikan *critical success factor*, isu strategi dan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja.
- Penyusunan matriks peran hasil sebagai bagian dari proses penetapan sasaran kinerja individu belum sepenuhnya memanfaatkan pola perjanjian kinerja yang menjabarkan setiap kondisi kinerja sesuai levelnya.
- Identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bagian dari proses melihat pola kolaborasi kinerja lintas sektor belum dijabarkan secara spesifik dan belum mempertimbangkan kondisi/isu strategi yang ada.

2. Pengukuran Kinerja



- Data kinerja belum dapat diyakini keakuratannya dikarenakan pengumpulan data masih manual
- Pengukuran kinerja individu belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi sehingga belum terlihat keterkaitan hasil pelaporan aktivitas tersebut dalam mengawal capaian kinerja *outcome* atasnya.
- Monitoring dan evaluasi belum mengukur capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan.
- Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.

3. Pelaporan kinerja

- Informasi terkait hasil analisis efesiansi sumber daya dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja kedepan
- Pemanfaatan informasi yang tertuang dalam LKjIP guna sebagai alat penentuan target tahunan belum dimanfaatkan, terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

- Evaluasi internal sudah dilakukan namun kualitas hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum cukup menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah.
- Monitoring evaluasi atas temuan dan rekomendasi belum dilakukan secara berkala.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Tahun 2023 Nilai SAKIP Kabupaten Malinau tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2023 namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti dijelaskan pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yang telah disajikan diatas.

Adapun solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Nilai SAKIP yaitu:

- Menyempurnakan kualitas rumusan kinerja yang sudah ada sehingga indikator kinerja memenuhi kriteria SMART dan Cukup
- Menyempurnakan kualitas perjanjian kinerja dengan memperhatikan *critical success factor*, isu strategi dan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja.
- Membangun suatu sistem pengumpulan data dan pengukuran kinerja di internal pemda yang lebih lengkap dan terintegritasi.
- Mendorong pelaksanaan pengukuran kinerja individu.
- Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
- Melakukan penyeragaman format Informasi terkait hasil analisis efesiansi sumber daya dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja kedepan
- Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam LKjIP guna sebagai alat penentuan target tahunan belum dimanfaatkan, terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya.
- Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP internal dan menjabarkan secara spesifik temuan yang menjadi masalah di tiap Perangkat Daerah.
- Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah melalui LHE.



Gambar 3.1. Pendampingan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Dava



Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP sebesar Rp. 472.483.012 dari anggaran program-program yang mendukung capaian kinerja indikator Nilai SAKIP sebesar Rp. 599.404.554 atau capaian realisasi keuangan sebesar 78,83% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,63%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 126.921.542 atau sebesar 21,17%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP kepada setiap kasubbag penyusunan program dan staf Perangkat Daerah baik melalui studi belajar ke kabupaten lain yang memiliki nilai SAKIP lebih tinggi (A) dan bimbingan teknis di awal tahun sebelum pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:



Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	92,46	penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	78,83%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Dari tabel 3.17.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

a) Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah yang disebut LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun Anggaran, yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Berdasarkan perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2021)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Peresentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Tahun 2020
1	2	3	4	5



Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau	Predikat	2,08	2,71	-
--	----------	------	------	---

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Malinau

Berdasarkan Tabel di atas, perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adanya kenaikan status penilaian dari rendah di tahun 2021 menjadi sedang di tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021
1	2	3	4	5
Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau	Predikat	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah

Sumber : bagian Tata Pemerintahan Setkab. Malinau

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021 dengan hasil Rendah, berdasarkan hasil penilaian Evaluasi LPPD Kabupaten Malinau oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di tahun 2022. Sedangkan Target Akhir Renstra Tahun 2021 adalah Sangat Tinggi.



a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pelaksanaan dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan instrumen pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga hak dan kewenangan daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita nasional. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan Capaian Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau antara lain:

- Koordinasi antara Tim Teknis Penyusun LPPD dengan Tim Penyedia Data dari OPD berjalan dengan baik.

Sedangkan faktor-faktor penghambat Capaian Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau Tahun 2022 antara lain:



- Program/Kegiatan yang menjadi Urusan Wajib OPD tersebut tidak dilaksanakan/diprioritaskan dalam Kegiatan Tahunan, sehingga banyak urusan yang capaiannya masih kosong karena menggunakan surat pernyataan.
- Kurang maksimalnya OPD dalam memberikan data yang dibutuhkan, sehingga Capaian Kinerjanya pun rendah.
- Banyak Kegiatan Urusan Wajib yang tidak dilaksanakan karena terkendala Anggaran.

Adapun solusi kedepan akan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap komponen-komponen yang bobot nilainya masih kurang dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan Capaian Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Salah satu cara untuk melihat Realisasi suatu Program adalah dengan melihat Realisasi Keuangan dari Program tersebut. Realisasi Keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara Program, Kegiatan, Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.8

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau	2,71	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	82,83%

Bagian : Tata Pemerintahan Setkab. Malinau

Dari tabel diatas, tampak bahwa Indikator Kinerja didukung oleh Program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 Capaian Indikator Kinerja Nilai LPPD yaitu 2,71 sedangkan Realisasi Keuangannya adalah sebesar 82,83%.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2022 Realisasi Keuangan untuk Program yang terkait peningkatan Predikat Nilai LPPD Kabupaten Malinau adalah Rp. 207.081.000,00 sementara target Anggarannya yaitu Rp. 250.000.000,00 Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 17,17%.



b) Indeks Kepuasan Masyarakat

Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	82,75	97,35%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Tahun 2023 capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 97,35% dari target 85 dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 82,75. Dari capaian yang diperoleh di tahun 2023 ini maka, kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau Tahun 2023 masuk dalam predikat “**Baik**”.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu	Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun
-------------------	--------	----------------------	----------------------	---



			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,75	78,28	79,31	80,71	94,59%	95,84%	97,53%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 82,75 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 78,28 atau realisasi capaian kinerja sebesar 94,59%, realisasi tahun 2021 sebesar 79,31 atau realisasi capaian kinerja sebesar 95,84%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 80,71 atau realisasi capaian kinerja sebesar 97,53% dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 5,71% terhadap capaian tahun 2020, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 4,33% terhadap capaian tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 2,46% terhadap capaian kinerja tahun 2022

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,75	88,50	93,50%
--	-------	-------	-------	--------

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 82,75 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 88,50, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 93,50%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyusunan IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai IKM Kabupaten Malinau diperoleh dari OPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan publik. IKM di Kabupaten Malinau dilaksanakan secara mandiri (OPD melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga).

OPD yang melaksanakan Pelayanan Publik di Kabupaten Malinau dan melaksanakan/ membuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 6 OPD UPP dan 18 UPT Bidang Kesehatan berikut nama dan nilai IKM yang diperoleh :

Tabel
Nilai IKM Yang Melaksanakan Pelayanan Publik di Kabupaten Malinau
Tahun 2023

NO	NAMA OPD	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSIKAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,87	B	Baik



2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,75	B	Baik
3	Dinas Kesehatan PPKB	80,03	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	81,00	B	Baik
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	86,02	B	Baik
	Kecamatan Malinau Utara	82,94	B	Baik
6	RSUD	77,82	B	Baik
7	PKM di Kabupaten Malinau	79,62	B	Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU		82,75	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Dari data tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisaran di antara 76,61–88,30. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas,
- 2) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- 3) Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat semakin baik.



Dari nilai unsur terendah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui masalah atau kendala yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal berbeda-beda. Dari beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang telah disebutkan diatas maka akan dilakukan alternatif solusi kedepan untuk perbaikan yaitu :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan pada OPD pelayanan publik di Kabupaten Malinau mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tahun 2023 Nilai IKM Kabupaten Malinau tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2023 namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 mengalami kanaikan dari tahun ke tahun seperti dijelaskan pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yang disajikan diatas.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar Rp. 452.206.914 dari anggaran



yang disediakan sebesar Rp .517.634.176 atau capaian realisasi sebesar 87,36% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 97,35%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.65.427.262 atau sebesar 12,64%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan Sumber Daya Manusia melalui studi belajar ke kabupaten lain yang memiliki nilai Pelayanan publik yang tinggi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,35%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,36%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2023 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 97,35% dengan realisasi keuangan



87,36%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

c) Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2021)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab. Malinau

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 adalah perbandingan Realisasi Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 yaitu 100% dengan Realisasi Tahun 2021 dengan nilai 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap Capaian Tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Akhir yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.14

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab. Malinau

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021 adalah perbandingan Realisasi Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 yaitu 100% dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021 yaitu 100% , maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap Target akhir RENSTRA tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hibah/Bansos yang ditindaklanjuti pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021, dimana Targetnya adalah sebesar 100% dan Realisasinya adalah sebesar 100%, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang ditindaklanjuti pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 sudah berjalan dengan Optimal.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan Persentase Pengajuan Proposal Hibah /Bansos yang Ditindaklanjuti pada Sekretariat daerah Kabupaten Malinau



Tahun 2021:

- 1) Administrasi pengajuan Hibah/Bansos sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Masyarakat/LSM/Ormas telah memahami prosedur penyaluran Hibah/Bansos yang telah ditetapkan.
- 3) Upaya dari Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat daerah Kabupaten Malinau yang telah berusaha seoptimal mungkin dalam mensosialisasikan prosedur penyaluran Hibah/Bansos kepada setiap Masyarakat/LSM/Ormas yang mengajukan permohonan Hibah/Bansos.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan Capaian Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat Realisasi Keuangan dari program tersebut. Hubungan antara Program, Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos Sesuai Pedoman dan Ditindaklanjuti	100%	Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	78.98 %

Sumber : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab. Malinau



Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh Program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 Capaian Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos sesuai Pedoman dan Ditindaklanjuti pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 mencapai angka 100% dengan rata-rata Realisasi Keuangan 78,98 %. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2022 Realisasi Keuangan untuk program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah Rp. 16.247.827.400,-, sementara Pagu Anggaran untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 yaitu Rp. 20.573.274.171,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi Anggaran 78,98 %. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran

d) Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Berdasarkan perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian
-------------------	--------	-------------------------	----------------------------	---



				Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022
1	2	3	4	5
Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setkab. Malinau

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 adalah perbandingan Realisasi Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2023 yaitu 100% dengan Realisasi Tahun 2022 dengan nilai 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap Capaian Tahun 2023.

Berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA 2022-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 20223
Dengan Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
1	2	3	4	5
Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setkab. Malinau

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023 adalah perbandingan Realisasi Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2023 yaitu 100% dengan Target Akhir



Renstra Tahun 2023 yaitu 100% , maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap Target Akhir RENSTRA tahun 2023.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan tingkat Target dan Realisasi Persentase Koordinasi Kebijakan pembangunan Ekonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023, dimana Targetnya adalah sebesar 100% dan Realisasinya adalah sebesar 100%, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 berjalan dengan Optimal.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan Capaian Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mendukung optimalisasi kegiatan koordinasi pembangunan ekonomi daerah.
- 2) Adanya SDM yang dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- 3) Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan perekonomian antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, Organisasi/Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan Capaian Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat Realisasi Keuangan dari program tersebut. Hubungan antara Program, Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	100%	Perekonomian dan Pembangunan	89,84%

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setkab. Malinau

Dari tabel diatas, tampak bahwa Indikator Kinerja didukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 Capaian Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah pada Sekretariat Daerah kabupaten Malinau Tahun 2022 mencapai angka 100% dengan rata-rata Realisasi Keuangan 89,84%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2023 Realisasi Keuangan untuk Program Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah Rp. 33.131.406.558.00,- sementara Pagu Anggaran untuk Program Perekonomian dan



Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau setelah perubahan tahun 2023 yaitu Rp. 36.877.813.000.00,-. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 89,84%. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan Persentase Koordinasi.

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2022 Realisasi Keuangan untuk Program Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah Rp. 2.927.172.000.00,- sementara Pagu Anggaran untuk Program Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 yaitu Rp. 5.150.000.000.00,-. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 56,83%. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan Persentase Koordinasi.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 sebesar Rp. **136.761.112.661,-** dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. **116.662.549.824,-** dan Belanja Modal sebesar Rp. **20.048.562.837,-**

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2022:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	--------	------------------	-------------------	---



	Belanja Daerah	136.761.112.661,00	119.713.335.788,00	87,53
1	Belanja Operasi	389.731.926.445,00	352.371.501.579,00	84,47
2	Belanja Modal	461.020.015.109,00	414.536.790.271,00	76,27

Sumber : SIPD 2023

Anggaran Belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau mencapai Rp. **136.761.112.661,-** dengan Anggaran yang Terealisasi sebesar Rp. **119.713.335.788,-**. Anggaran Belanja pada Sekretariat Daerah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Belanja Langsung terdiri dari 2 (Dua) jenis Belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Adapun Anggaran yang terealisasi pada Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **136.761.112.661,-** atau **87,53%** dengan rincian Realisasi Belanja Operasi Sebesar Rp. **116.662.549.824,-** atau **84,47%** dan Realisasi Belanja Modal Rp. **15.329.250.647,-** atau **76,27%**.

Berdasarkan Persentase Realisasi terhadap Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 sebesar **87,53%**, maka dapat disimpulkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah Tinggi.



Tabel 3.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023:

No	Urusan Pemerintah an	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Rp.	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah an	Program Penunjang Urusan Pemerintah an daerah/Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	68.895.000	91,86	97,68	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.379.837.243	24.181.745.783	74,68	74,68	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.926.391.082	17.047.200.319	95,10	95,48	Bagian Umum
			2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	599.080.000	571.968.500	95,47	95,47	Bagian Umum
			3 Penyediaan Bahan/Material	194.625.000	169.560.000	87,12	100,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			4 Penyediaan Bahan / Material	290.737.500	290.597.000	99,95	100,00	Bagian Umum



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.266.422.000	1.265.117.470	99,90	99,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.450.882.000	23.421.717.565	99,88	99,99	Bagian Umum
			7 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	49.961.100	49.961.100	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.618.800	344.347.400	99,92	100,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	440.880.000	440.880.000	100,00	100,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			10 Fasilitas Kunjungan Tamu	275.000.000	275.000.000	100,00	100,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah/Kabupaten	Pengadaaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	7.763.616.000,00	6.294.125.189,00	81,07	81,07	Bagian Umum
		2	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	6.484.899.498,00	5.966.254.779,00	92,00	92,00	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang						
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.181.455.427,00	5.924.375.696,00	95,84	97,15	Bagian Umum



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.422.941.004,00	9.083.762.737,00	96,40	96,40	Bagian Umum
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.284.900.000,00	998.730.700,00	77,73	77,73	Bagian Umum
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.068.447.934,00	8.321.657.550,00	75,18	75,18	Bagian Umum
			Penataan Organisasi						
			1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	170.000.000,00	143.750.000,00	84,56	100,00	Bagian Organisasi
			2	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	333.418.406,00	330.708.966,00	99,19	99,49	Bagian Organisasi
			3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	83.999.644,00	83.319.644,00	99,19	99,19	Bagian Organisasi
			4	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	46.898.000,00	46.218.000,00	98,55	98,55	Bagian Organisasi
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
			1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	757.698.000,00	757.698.000,00	100,00	100,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

			1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.088.730.000,00	12.064.709.000,00	92,18	92,31	Bagian Kesra
			2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	7.484.544.171,00	4.183.118.400,00	55,89	84,74	Bagian Kesra
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						
			1	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	1.811.942.633,00	1.445.196.162,00	79,76	81,51	Bagian Umum
			2	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	1.102.189.000,00	981.121.104,00	89,02	93,20	Bagian Umum
			Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa						
			1	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	376.339.282,00	355.159.273,00	94,37	94,37	Bagian Barang dan Jasa
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
			1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.150.000.000,00	3.015.358.000,00	58,55	78,77	Bagian Ekonomi
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
			1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	149.764.450,00	138.207.333,00	92,28	92,28	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			JUMLAH		136.761.112.661,00	119.713.335.788,00	87,53	93,48	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau periode Tahun 2023. Pada awal Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Strategis yang berisi terget-target Kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu kebersamaan peran dari setiap Unit Kerja yang ada dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk dapat mewujudkan Capaian Kinerja yang lebih optimal di tahun yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan Kinerja di Tahun berikutnya.